



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA METRO



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



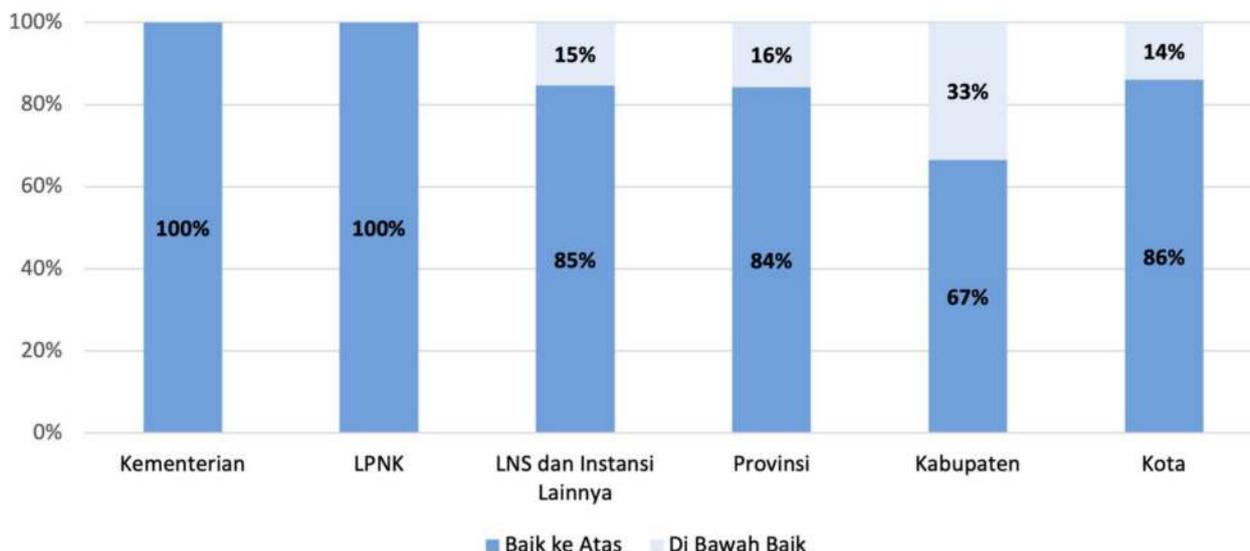
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

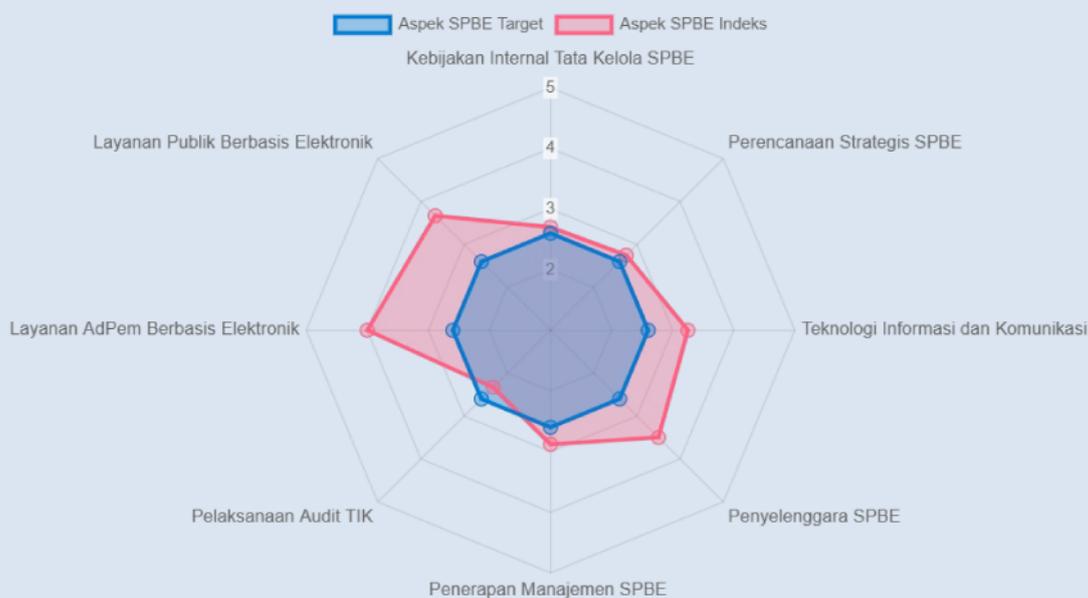
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,34
Domain Kebijakan SPBE	2,70
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>2,70</i>
Domain Tata Kelola SPBE	3,10
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>2,75</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>3,25</i>
<i>Penyelenggara SPBE</i>	<i>3,50</i>
Domain Manajemen SPBE	2,73
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	<i>2,88</i>
<i>Audit TIK</i>	<i>2,33</i>
Domain Layanan SPBE	3,87
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>4,00</i>
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	<i>3,67</i>

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan pemenuhan aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Metro berupa kebijakan untuk indikator: Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Inovasi proses bisnis, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Daerah, Layanan Jaringan, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Keamanan Informasi, dan konsep Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah mencakup semua aspek yang telah mengatur penerapan SPBE yang lengkap.

- Kekuatan
Dokumen kebijakan yang dimiliki terkait tata kelola SPBE telah ditetapkan dan mengatur secara kompleks dan diterapkan untuk seluruh unit
- Kelemahan
Terdapat kelemahan pada aspek kebijakan internal Tata Kelola SPBE yaitu pada indikator Arsitektur SPBE karena dokumen kebijakan yang ada belum mengatur lengkap semua aspek: Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan pemenuhan aspek perencanaan strategis terkait tata kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Metro berupa Konsep kebijakan internal yang meliputi indikator: Inovasi Proses Bisnis SPBE, Arsitektur SPBE Instansi, Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi, Pusat/Pemerintah Daerah, Rencana dan Anggaran SPBE yang telah kompleks

- Kekuatan
Kekuatan Pemerintah Metro terhadap keterlaksanaan SPBE untuk aspek perencanaan strategis terdapat pada indikator Inovasi Proses Bisnis SPBE, Arsitektur SPBE Instansi, Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi, Pusat/Pemerintah Daerah, Rencana dan Anggaran SPBE
- Kelemahan
Kelemahan pelaksanaan aspek Perencanaan Strategis SPBE dengan Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE masih standar perlu ditingkatkan dengan melakukan reviu dan evaluasi

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan pemenuhan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait pelaksanaan SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Metro terdapat pada indikator: Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Pembangunan Aplikasi SPBE

- Kekuatan
Kekuatan terhadap peketrlaksanaan SPBE pada Pemkot Bandar Lampung terdapat pada Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE karena telah melakukan reviu dan evaluasi yang telah didukung dengan data yang valid
- Kelemahan
Pemerintah Daerah Metro Perlu meningkatkan nilai kematangan pada indikator Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk dikonsultasikan oleh unit TIK dan perlu diterapkan pada seluruh unit kerja

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan pemenuhan aspek Penyelenggaraan SPBE terkait tata kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Metro ditunjukkan berdasarkan dokumen yang telah ditetapkan dan mengatur Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Penerapan SPBE

- Kekuatan
Belum Memiliki Kekuatan Pada Aspek Ini
- Kelemahan
Belum Memiliki Kelemahan Pada Aspek Ini

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan pemenuhan aspek penerapan Manajemen SPBE terkait manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Metro berupa konsep kebijakan yang meliputi Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, dan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia

- Kekuatan
Pemerintah Kabupaten Metro memiliki kekuatan pada aspek penerapan manajemen SPBE terdapat pada indikator Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, dan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang telah diterapkan pada seluruh unit
- Kelemahan
Kelemahan keterlaksanaan SPBE pada aspek Penerapan Manajemen SPBE terdapat pada Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data yang penerapannya tanpa mengacu pada pedoman

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan pemenuhan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait pelaksanaan SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Metro ditunjukkan dengan bukti dokumen yang mencakup capaian nilai indikator Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang telah diterapkan pada seluruh unit kerja

- Kekuatan
Pemerintah Kab Metro memiliki kekuatan dalam pelaksanaan audit TIK untuk indikator Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE karena telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman, kegiatan Audit dilaksanakan oleh auditor internal TIK
- Kelemahan
Kelemahan terhadap keterlaksanaan Audit TIK Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE karena dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan tanpa pedoman

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan pemenuhan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait pelaksanaan SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah daerah Metro dalam penerapan SPBE untuk indikator: Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Layanan Kepegawaian yang telah mencapai kematangan empat karena telah melakukan reviu dan evaluasi berdasarkan dokumen pendukung

- Kekuatan
Pemerintah daerah Metro dalam melaksanakan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik telah melakukan reviu dan evaluasi yang berkesinambungan untuk semua indikator
- Kelemahan
Belum melakukan rencana tindak lanjut dari reviu yang dilakukan berdasarkan rekomendasi evaluasi yang dilakukan tahun sebelumnya dan tahun sekarang

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan pemenuhan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait pelaksanaan SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah daerah Metro dalam penerapan SPBE untuk indikator: Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor satu, Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor dua, dan Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor tiga yang telah mencapai kematangan empat karena telah melakukan reviu dan evaluasi berdasarkan dokumen pendukung. Pemerintah daerah Metro dalam melaksanakan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik telah melakukan reviu dan evaluasi yang berkesinambungan untuk semua indikator. Belum melakukan rencana tindak lanjut dari reviu yang dilakukan berdasarkan rekomendasi evaluasi yang dilakukan tahun sebelumnya dan tahun sekarang

- Kekuatan
Pemerintah daerah Metro dalam keterlaksanaan aspek layanan publik telah melakukan reviu dan evaluasi pada semua indikator yang ada
- Kelemahan
Belum melakukan rencana tindak lanjut dari reviu yang dilakukan berdasarkan rekomendasi evaluasi yang dilakukan tahun sebelumnya dan tahun sekarang

REKOMENDASI

Perlu melakukan revisi kebijakan untuk Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang harus mencakup ruang lingkup: Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Untuk Indikator yang telah mencapai kematangan level 3 perlu dilakukan reviu dan evaluasi dengan mengacu pada pedoman yang ada dan terencana secara berkelanjutan. Untuk Indikator yang telah mencapai kematangan level empat perlu dilakukan rencana aksi tindak lanjut untuk perbaikan sebagai rekomendasi dari evaluasi yang telah dilakukan

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	4
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024